



SENIN, 21 MEI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pada hari yang sama, Sabtu (19/5), selain mengeledah rumah pribadi mantan kadis PUPR M Suhadi di Jalan Buldani Masik Kecamatan Kota Manna, KPK juga mengeledah rumah kediaman pribadi kontraktor lainnya Harmen Jalan H. Pudir Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna, serta rumah pribadi tersangka

(perantara) suap Nursilawati di Gang Canada Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna.

5 Paket Proyek PL Tetap Lanjut

Lima paket proyek PL dengan nilai Rp 750 juta di Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan oleh KPK, Selasa (20/5) di kediaman pribadi Bupati BS non aktif Dirwan Mahmud, diharapkan oleh DPRD BS agar tetap bisa terlaksana tahun ini.

"Proyek 5 paket itu sudah dianggarkan, tapi memang belum berjalan. Kita harapkan pelaksanaan paket-paket tersebut tetap bisa dilanjutkan, tentunya sesuai aturan yang ada. Rekanan yang ditunjuk memenuhi syarat dan harus profesional," ujar Wakil Ketua I DPRD BS Susman Hadi, SP, MM.

Kelima paket terkait OTT yang menyeret Bupati BS non aktif Dirwan Mahmud menjadi tersangka penerima suap, berada di Kecamatan Pino Raya. Meliputi proyek normalisasi/pengerasan Telago Dalam menuju Cinto Mandi, peningkatan jalan Desa Tango Raso (arah jembatan dua), proyek jalan Rabat Beton Desa Napal Melintang Kecamatan Pino Raya, proyek jalan rabat beton Desa Pasar Pino (Padang Lakaran), dan proyek rehab jembatan gantung Desa Telaga Dalam.

Uang yang diberikan tersangka pemberi suap Juhari Sunil alias Jukak melalui isteri muda Dirwan Mahmud Heni Dirwan diduga sebagai uang "pelicin" untuk mendapatkan proyek tersebut. "Paket-paket itu sudah ditunggu masyarakat, karena itu kita harapkan tetap bisa direalisasikan oleh OPD teknis," sambung Susman.

Plt. Bupati BS Gusnan Mulyadi, SE, MM menegaskan setiap pembangunan harus berjalan, termasuk kegiatan 5 paket di Dinas PUPR tersebut. Namun Gusnan mengingatkan bahwa kegiatan pembangunan itu haruslah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, begitu juga dengan penunjukan rekanan selaku penanggungjawab kegiatan. "Setiap kegiatan pembangunan harus tetap berjalan, dan semua harus sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya. (key)